

Suparto

NIM: 212365201002

Pembimbing 1 : Dr. H. Machwal Huda. M.Si

NIDN. 0711066201

Pembimbing 2 : Farichatun Nisa', S. IAN., M.KP

NIDN. 0729099103

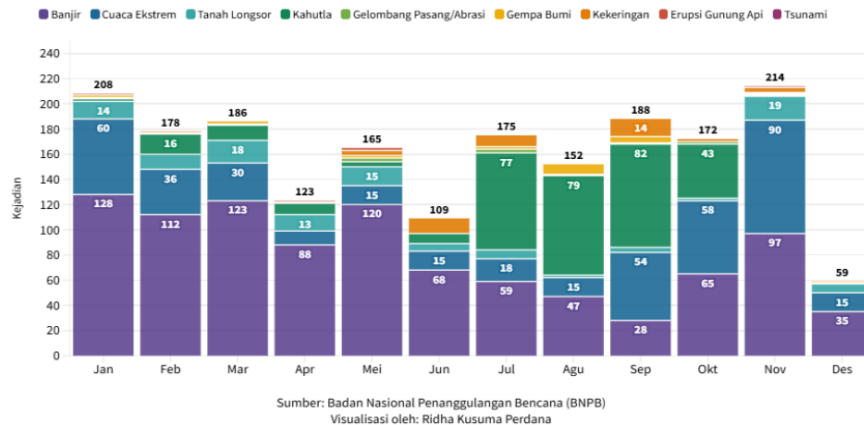
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia tercatat sebagai Negara yang rawan terjadinya bencana alam. Sepanjang abad 21, tercatat hingga 2018 Indonesia telah mengalami ± 1.999 kejadian bencana alam, seperti gempa bumi dan tsunami, erupsi gunung berapi, banjir, longsor, kebakaran hutan dan lahan (Heryanto, 1999). Posisi geografis Indonesia berada di garis gunung berapi dan diapit oleh dua samudra besar (Wardhani, 20145). Selain itu, Indonesia berada pada pertemuan tiga lempeng utama dunia, menyebabkan rawan terhadap gempa bumi yang diikuti tsunami. Letak Indonesia di cincin api (*ring of fire*) menjadikan Indonesia negara yang kerap dilanda letusan gunung berapi (Tempo, 2018).

Berikut ini jumlah bencana alam yang terjadi di Indonesia :



Gambar 1.1 Jumlah bencana di Indonesia tahun 2024

Selama tahun 2024 terdapat 1.088 bencana banjir dan 135 bencana tanah longsor yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Korban meninggal dan hilang dalam bencana banjir bandang sebanyak 248 orang sedangkan bencana tanah longsor berjumlah 233 orang.

Data geografis tersebut menunjukkan kebenaran gempa dan tsunami Aceh 2004 silam menjadi bencana terbesar pertama di Indonesia dan Tsunami terbesar ketiga di dunia setelah Krakatau dan Jepang (Liliweri, 2020). Seperti halnya Indonesia, Jepang juga disokong oleh banyak lempengan bumi yang selalu aktif bergerak setiap tahunnya, sehingga rawan terjadinya bencana gempa dan tsunami.

Melihat fenomena ini, pemerintah memandang penting pengendalian bencana. Bencana alam memang tidak bisa dielakkan, namun pentingnya kesiapsiagaan dan mitigasi bencana untuk mengurangi risiko bencana. Belajar dari bencana gempa dan tsunami Aceh 2004 yang menimbulkan ratusan korban

jiwa, Indonesia mulai mempersiapkan penanggulangan bencana dengan lebih terencana.

Salah satu upaya pemerintah Indonesia ialah membentuk lembaga pemerintah non-departemen, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang mempunyai tugas membantu pemerintah Indonesia dalam penanggulangan bencana sesuai dengan amanat yang tercantum pada UU No. 24 Tahun 2007 (Pristianto, 2019). Selain itu juga dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang melaksanakan tugas penanggulangan bencana di daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota dengan berpedoman pada kebijakan yang ditetapkan oleh BNPB.

Undang-Undang RI No 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana terdapat beberapa pasal terkait pentingnya informasi kebencanaan. Pasal 21 (c) menyebutkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana. Pasal 26 ayat 1(c) disebutkan setiap orang berhak untuk mendapatkan informasi secara tertulis atau lisan tentang kebijakan penanggulangan bencana. Pasal 27 (c) menyatakan setiap orang berkewajiban untuk memberikan informasi yang benar kepada publik tentang penanggulangan bencana¹.

Dari pasal di atas terlihat jelas bahwa informasi kebencanaan merupakan hal yang sangat penting untuk masyarakat. Kejelasan informasi akan

menentukan cara individu bereaksi terhadap bencana. Penyampaian informasi termasuk proses mitigasi bencana yang bertujuan untuk menekan seminimal mungkin dampak yang ditimbulkannya. Peran komunikasi risiko bencana yang merupakan bagian dari komunikasi lingkungan, menjadi hal mendasar dalam manajemen komunikasi bencana (Astoria, 2016).

Kabupaten Jombang adalah kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Timur yang ditetapkan secara resmi oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 Secara geografis Jombang berada pada 112° 03'45'' – 112° 27'21'' Bujur Timur dan 07° 20'21'' – 07° 46'45'' Lintang Selatan dengan luas wilayah 1.159,50 km², Kabupaten Jombang terdiri dari 21 Kecamatan, 306 Desa/Kelurahan dan 1.258 Dusun.

Pemandangan yang indah nan asri Kabupaten Jombang memiliki risiko akan kejadian bencana alam yang tinggi hampir semua desa di kabupaten Jombang memiliki tingkat kerawanan akan terjadinya bencana baik alam maupun non alam dan bahkan bencana sosial, sejarah kejadian bencana merupakan hal yang tidak dapat ditinggalkan. Sebagai contoh, Angin puting beliung di Desa Balongsari, Kecamatan Megaluh, pada 17 Januari 2024. Bencana ini terjadi akibat hujan deras disertai angin kencang. Banjir yang melanda Desa Jombok, Kesamben, Jombang Banjir akibat meluapnya Avur watudakon merendam permukiman penduduk Dusun Beluk dan Kedondong di Desa Jombok. Tinggi banjir di Dusun Beluk mulai sebetis orang dewasa

sampai 160 cm, sedangkan di Dusun Kedondong 20-70 cm. Hal ini disebabkan minimnya pengetahuan dan informasi kebencanaan di kalangan masyarakat.

Dalam upaya penanggulangan bencana, pemerintah melalui BPBD dapat melakukan berbagai pendekatan, salah satunya pendekatan *hard power* yang merupakan upaya menghadapi bencana dengan pembangunan fisik seperti membangun sarana komunikasi (Rudianto, 2019). Adanya komunikasi yang baik antara pemerintah dengan masyarakat dapat menjadi langkah efektif untuk mengurangi resiko bencana. Kecanggihan teknologi yang digunakan dan ketersediaan dana yang memadai, tidak akan berarti bila komunikasi tidak berjalan baik (Asteria, 2016).

No	Jenis Bencana	Tahun	Tahun	Tahun
		2022	2023	2024
1	Banjir	51	25	45
2	Longsor/Gerakan tanah	19	4	57
3	Angin	76	33	0
4	Kekeringan	0	1	0

Tabel 1.1 Tabel Jumlah Kejadian Bencana di Kabupaten Jombang Sumber: BPBD Kab. Jombang

Belajar dari peristiwa di atas, maka sudah seharusnya pemerintah bekerjasama dengan masyarakat mempersiapkan penanganan bencana sejak dini sebagai upaya menangani bencana dengan menekankan pada komunikasi bencana (*Disaster Communication*). Karena menurut Bakornas PB, paling tidak ada empat faktor utama bencana yang dapat menimbulkan banyak korban dan kerugian besar, yaitu kurangnya pemahaman terhadap karakteristik bahaya (*hazards*), sikap atau perilaku yang mengakibatkan penurunan sumberdaya

alam (*vulnerability*), kurangnya informasi/peringatan dini (*early warning*) yang menyebabkan ketidaksiapan, dan ketidakberdayaan atau ketidakmampuan dalam menghadapi ancaman bahaya (Prih Harjadi, dkk, 2017).

Pemerintah sebagai pengampu kebijakan penanggulangan bencana jelas tidak dapat bekerja sendiri tapi dapat melibatkan unsur mitigasi bencana yang potensial, yakni masyarakat. Dalam hal ini partisipasi masyarakat dalam upaya penanggulangan bencana adalah siklus alam yang harus terlibat dalam rangka untuk mempercepat pemulihan dari bencana. Dalam rangka mengoptimalkan peran masyarakat perlu proses pengembangan dan pengorganisasian manusia di semua aspek kehidupan masyarakat, sehingga tercapai output baik dalam kuantitas dan kualitas dengan tujuan risiko bencana bagi masyarakat dapat diminimalisir.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) memiliki peran penting dalam meningkatkan kesadaran dan kesiapsiagaan masyarakat, termasuk relawan bencana, dalam menghadapi berbagai risiko bencana. Kabupaten Jombang merupakan daerah yang rentan terhadap berbagai bencana alam seperti banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung. Oleh karena itu, BPBD Kabupaten Jombang memiliki tugas strategis dalam membina relawan bencana agar lebih siap dan tanggap dalam menghadapi situasi darurat. Peran BPBD Kabupaten Jombang dalam meningkatkan kesadaran dan kesiapsiagaan relawan bencana sangat krusial dalam upaya mitigasi bencana. Melalui edukasi, pelatihan, koordinasi, penyediaan sarana, dan evaluasi berkala, BPBD

mampu membentuk relawan yang lebih siap dalam menghadapi berbagai ancaman bencana. Dengan sinergi yang baik antara BPBD dan relawan, upaya penanggulangan bencana di Kabupaten Jombang dapat berjalan lebih optimal demi keselamatan masyarakat.

Berdasarkan paparan di atas peneliti menganggap penting untuk mengadakan suatu penelitian dengan mengangkat judul “Peran BPBD Terhadap Kesadaran Bencana Pada Kalangan Relawan Bencana Di Kabupaten Jombang”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka rumusan masalah dalam penulisan proposal ini adalah **Bagaimana Peran BPBD Dalam Peningkatan Kesadaran Bencana Pada Kalangan Relawan Bencana Di Kabupaten Jombang.?**

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Peran BPBD Dalam Peningkatan Kesadaran Bencana Pada Kalangan Relawan Bencana Di Kabupaten Jombang

1.4 Manfaat Penelitian

1.1 Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, sebagai sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu, khususnya Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

2.1 Secara praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) terutama Peran BPBD Terhadap Kesadaran Bencana Pada Kalangan Relawan Bencana Di Kabupaten Jombang

